

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam ekonomi nasional karena sumbangsihnya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kapabilitasnya dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan. Dominasi UMKM dalam struktur perekonomian nasional menjadikannya sebagai pilar utama dalam mendorong pemerataan pendapatan dan menjaga stabilitas ekonomi, khususnya pada saat terjadi perlambatan ekonomi maupun krisis (Ayyagari et al., 2022). Peran strategis tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan dan kinerja UMKM memiliki implikasi langsung terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat secara luas, sehingga peningkatan kualitas dan kinerja usaha UMKM menjadi agenda penting dalam pembangunan ekonomi nasional (KUMKM, 2024).

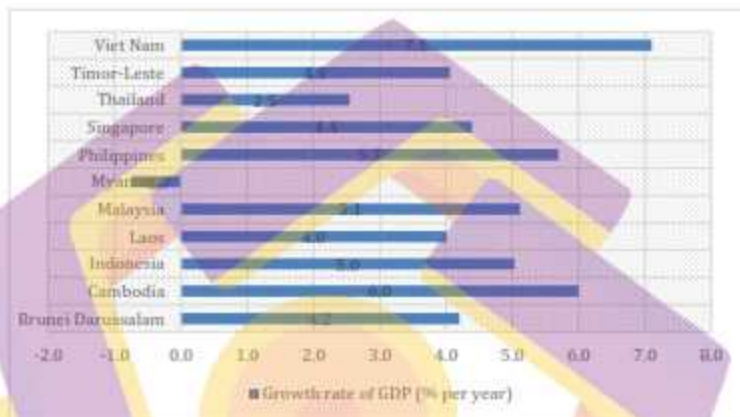
Kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto menunjukkan peran strategis sektor ini dalam menciptakan pemerataan ekonomi serta mengurangi kesenjangan pendapatan antarwilayah. Karakteristik UMKM yang relatif mudah berkembang di berbagai sektor usaha memungkinkan kelompok masyarakat berpendapatan rendah memperoleh akses terhadap peluang usaha baru. Peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi makro, melainkan juga melalui kemampuan usaha kecil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Peningkatan kinerja UMKM menjadi salah satu perhatian utama dalam kebijakan pengembangan ekonomi nasional.

Optimalisasi partisipasi UMKM masih dihadapkan pada berbagai masalah struktural, salah satunya terkait rendahnya tingkat formalitas usaha dan integrasi dalam sistem administrasi pemerintah. Sebagian besar UMKM, khususnya usaha mikro, masih beroperasi secara informal sehingga menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal, program bantuan pemerintah, serta pasar yang lebih luas dan berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan peningkatan jumlah UMKM tidak selalu diikuti oleh peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha secara merata. Proses integrasi UMKM ke dalam sistem formal, hingga saat ini masih mengalami hambatan, baik dari sisi kapasitas internal pelaku usaha maupun dari aspek kelembagaan, yang pada akhirnya berpotensi menghambat peningkatan pendapatan UMKM secara optimal (BPS, 2023).

Kondisi internal tersebut sejalan dengan dinamika perekonomian kawasan Asia Tenggara yang menunjukkan pertumbuhan relatif kuat namun belum merata antarnegara. Laporan *Asian Development Outlook 2025* dari Asian Development Bank (ADB) mencatat bahwa variasi pertumbuhan PDB di kawasan ASEAN mencerminkan perbedaan struktur ekonomi dan efektivitas kebijakan pembangunan (Asian Development, 2025). Negara dengan dukungan sektor produktif yang kuat serta inklusi ekonomi yang baik cenderung memiliki kinerja pertumbuhan lebih stabil. UMKM dalam hal ini berfungsi sebagai tulang punggung yang memperkuat struktur ekonomi

nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan basis usaha formal. Penguatan sektor UMKM menjadi faktor krusial bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing serta integrasi ekonomi di tingkat regional guna mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 1.1 Growth rate of GDP 2024

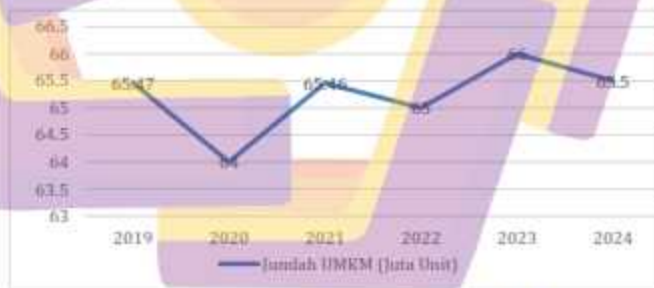
Sumber: Asian Development Bank

Populasi UMKM di Indonesia menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir. Data tahun 2019 mencatat jumlah unit usaha sebesar 65,47 juta, namun angka tersebut mengalami penyusutan menjadi 64 juta unit pada tahun 2020 karena efek dari pandemi Covid-19. Periode pemulihan pascapandemi ditandai dengan peningkatan jumlah UMKM hingga mencapai 66 juta unit pada tahun 2023, yang merepresentasikan pertumbuhan sebesar 1,52 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Rekapitulasi data pada akhir tahun 2024 menunjukkan angka sebesar 64,2 juta unit, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga

keberlanjutan usaha di tengah perubahan kondisi ekonomi nasional (Rahmadanti et al., 2024).

Fluktuasi jumlah UMKM tersebut tidak hanya terpengaruh oleh keadaan ekonomi makro, tetapi juga dipengaruhi oleh kemaempuhan UMKM dalam mempertahankan keberlanjutan usahanya. Banyak UMKM yang mampu bertahan pada tahap awal pendirian usaha, namun mengalami kesulitan dalam mempertahankan stabilitas pendapatan dalam jangka panjang, terutama dalam menghadapi guncangan eksternal (Greguerce et al., 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah UMKM belum tentu diikuti oleh peningkatan kualitas dan keberlanjutan usaha. Sehingga, diperlukan analisis yang lebih mendalam tentang elemen-elemen yang mempengaruhi peningkatan pendapatan UMKM sebagai indikator keberhasilan usaha.

Sumber: KADIN Indonesia



Gambar 1.2 Pertumbuhan Jumlah UMKM di Indonesia

Akses permodalan memiliki peran penting dalam menentukan kinerja dan keberlanjutan UMKM. Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan akses permodalan UMKM diwujudkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu skema pembiayaan dengan tingkat bunga rendah yang ditujukan bagi pelaku usaha produktif. Program KUR diluncurkan

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 dengan tujuan mempercepat pengembangan sektor riil serta pemberdayaan UMKM melalui penyediaan kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi bagi pelaku usaha yang belum memiliki agunan tambahan yang memadai (Kemenko Perekonomian, 2025).

Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia selama periode 2021–2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, mencerminkan upaya pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi Covid-19. Tren positif tersebut tidak hanya memperluas akses kredit bagi UMKM yang menyumbang 61% terhadap PDB nasional tetapi juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja hingga 97% dari total pekerja di Indonesia, sejalan dengan strategi pemulihan ekonomi nasional Covid 19 (Kemenko, 2024).

Berdasarkan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, nilai realisasi realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia selama periode 2021–2024 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, realisasi penyaluran KUR tercatat sebesar Rp282,2 triliun. Nilai tersebut kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp365,5 triliun, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional.

Pada tahun 2023, realisasi penyaluran KUR mengalami penurunan menjadi Rp260,09 triliun. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh adanya penyesuaian kebijakan penyaluran serta kondisi perekonomian yang mulai stabil setelah masa pemulihan pasca pandemi. Selanjutnya pada tahun 2024, realisasi penyaluran KUR kembali mengalami peningkatan menjadi Rp282,44 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa program KUR tetap menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mendukung pembiayaan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Tidak semua pelaku UMKM mampu memanfaatkan pembiayaan KUR secara optimal untuk pengembangan usaha produktif. Sebagian pelaku usaha masih menggunakan pembiayaan untuk kebutuhan operasional jangka pendek sehingga dampaknya terhadap peningkatan pendapatan usaha belum maksimal. Selain itu, masih terdapat pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam mengakses KUR akibat keterbatasan persyaratan administratif dan minimnya literasi keuangan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penelitian mengenai peran KUR dalam meningkatkan pendapatan UMKM secara lebih komprehensif.



Gambar 1.3 Reallsasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tahun 2021-2024

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Aspek Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kinerja UMKM selain akses permodalan. NIB berfungsi sebagai legalitas dasar yang memiliki peranan penting bagi pelaku UMKM. Keberadaan NIB berfungsi sebagai identitas usaha yang diakui secara resmi oleh pemerintah serta menjadi sarana bagi UMKM untuk memperoleh berbagai kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Melalui kepemilikan NIB, pelaku UMKM dapat mengakses berbagai fasilitas dan program dukungan, termasuk pembiayaan usaha, peluang perluasan pasar, serta kemudahan dalam kegiatan kepabeanaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerbitan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) mampu meningkatkan tingkat formalitas usaha UMKM serta memperbesar peluang pelaku usaha dalam memperoleh akses pembiayaan dan memperluas jaringan usaha (Kasyir et al., 2024).

Data menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di kalangan UMKM masih relatif rendah. Hingga April 2023, kepemilikan LU baru mencapai sekitar 5,8% dari total 64,19 juta UMKM. Pemerintah menargetkan sebanyak 10 juta UMKM memiliki NIB hingga akhir tahun 2023 dengan tujuan meningkatkan tingkat formalisasi usaha serta memperluas akses UMKM terhadap berbagai program pemberdayaan (Haryanti, 2023). Rendahnya tingkat kepemilikan NIB menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih beroperasi secara informal, sehingga membatasi akses mereka terhadap sumber daya ekonomi dan berbagai bentuk dukungan pemerintah.



Gambar 1.4 Perkembangan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha pada UMKM 2022-2024

Sumber: Profil Industri Mikro dan Kecil

Faktor sumber daya manusia, khususnya jumlah pekerja, memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat produktivitas dan pendapatan UMKM. Data menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional (Kadin Indonesia, 2023). Peran tenaga kerja dalam UMKM tidak hanya berkaitan dengan jumlah pekerja, tetapi juga mencakup kualitas keterampilan, pengalaman kerja, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Peningkatan jumlah pekerja berpotensi meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pengelolaan tenaga kerja yang efektif memungkinkan pelaku UMKM mengoptimalkan proses produksi dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Penambahan jumlah pekerja yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja berpotensi menimbulkan peningkatan biaya operasional yang dapat menurunkan tingkat keuntungan

usaha. Pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan, penguatan manajemen kerja, serta pemanfaatan teknologi produksi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM dalam jangka panjang.

Faktor internal berupa modal sendiri juga memiliki peran penting dalam menentukan kinerja UMKM selain dukungan faktor eksternal seperti Kredit Usaha Rakyat dan Nomor Induk Berusaha (Nugroho et al., 2022). Ketersediaan modal sendiri yang memadai memberikan fleksibilitas bagi pelaku UMKM dalam mengambil keputusan usaha, mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal, serta meningkatkan ketahanan usaha dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi (Nelyndri et al, 2025). Penggunaan modal sendiri memungkinkan pelaku usaha mengelola kegiatan operasional tanpa tekanan kewajiban pembayaran bunga maupun cicilan pinjaman, sehingga memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menjaga stabilitas arus kas usaha.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar UMKM di Indonesia masih mengandalkan modal sendiri sebagai sumber pembiayaan utama, terutama akibat keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal seperti kredit perbankan. Data menunjukkan bahwa sekitar 69% pelaku UMKM membiayai usahanya menggunakan modal sendiri atau modal yang berasal dari keluarga (Moruka, 2023). Ketergantungan terhadap pembiayaan internal berpotensi membatasi kemampuan UMKM dalam melakukan ekspansi usaha, seperti peningkatan kapasitas produksi, pengembangan inovasi produk, serta perluasan jaringan pemasaran. Struktur permodalan yang optimal melalui

kombinasi modal sendiri dan pembiayaan eksternal menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha UMKM.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kinerja dan pendapatan UMKM. Akses terhadap pembiayaan formal, seperti KUR terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan UMKM di Indonesia (Hutagalung, 2024). Jumlah tenaga kerja juga berpengaruh positif terhadap tingkat produktivitas UMKM, dengan catatan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan (Isnawati Abas et al., 2025). Kepemilikan NIB memberikan dampak positif terhadap akses pasar dan tingkat kepercayaan konsumen, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan UMKM (Khotimah et al., 2025).

Pengaruh modal sendiri terhadap kinerja UMKM telah banyak dikaji dalam penelitian terdahulu. Proporsi modal sendiri yang lebih besar dalam struktur permodalan UMKM terbukti mampu memberikan stabilitas keuangan yang lebih baik serta mengurangi risiko kebangkrutan (Aliffah et al., 2024). Ketersediaan modal sendiri memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan operasional tanpa adanya tekanan kewajiban pembayaran bunga maupun cicilan pinjaman. Kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola modal sendiri juga mencerminkan tingkat kemandirian usaha serta kapasitas manajemen keuangan yang dimiliki pelaku usaha dalam mempertahankan keberlanjutan usaha.

Ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap modal sendiri berpotensi membatasi pertumbuhan usaha akibat keterbatasan kapasitas pembiayaan untuk kegiatan ekspansi, seperti peningkatan kapasitas produksi, pengembangan inovasi produk, serta perluasan jaringan pemasaran. Keterbatasan sumber pembiayaan internal dapat menghambat kemampuan UMKM dalam meningkatkan daya saing usaha di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Keseimbangan antara penggunaan modal sendiri dan pembiayaan eksternal, seperti Kredit Usaha Rakyat, menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan (Martinez et al., 2023). Kombinasi struktur permodalan yang optimal berpotensi meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengembangkan usaha sekaligus menjaga stabilitas keuangan usaha dalam jangka panjang.

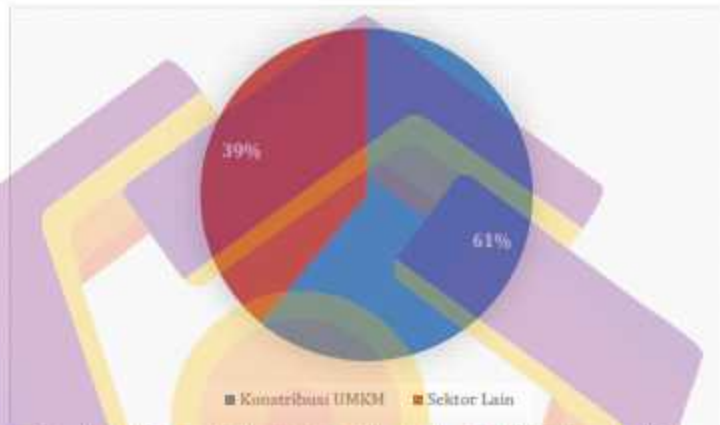
Konteks regional merupakan variabel penting dalam analisis kinerja UMKM karena setiap wilayah memiliki karakteristik ekonomi, sosial, dan budaya yang berbeda. Perbedaan karakteristik tersebut berpotensi memengaruhi pola pengelolaan usaha, struktur permodalan, serta kemampuan pelaku UMKM dalam beradaptasi terhadap dinamika lingkungan bisnis. Variasi tingkat pembangunan ekonomi antarwilayah di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan akses terhadap sumber daya produksi, infrastruktur, dan teknologi yang dapat memengaruhi produktivitas serta keberlanjutan usaha UMKM. Kondisi wilayah dengan akses infrastruktur yang terbatas cenderung menghadapi hambatan dalam pengembangan usaha,

terutama dalam memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi operasional usaha.

Kebijakan pemerintah daerah yang berbeda antar wilayah turut memengaruhi efektivitas program pemberdayaan UMKM, termasuk dalam pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat dan implementasi legalitas usaha. Perbedaan dukungan pemerintah daerah dalam bentuk pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, serta kemudahan perizinan dapat menyebabkan variasi tingkat keberhasilan UMKM dalam meningkatkan pendapatan usaha. Penelitian yang difokuskan pada wilayah geografis tertentu memungkinkan diperolehnya hasil analisis yang lebih kontekstual dan relevan sebagai dasar perumusan kebijakan pengembangan UMKM sesuai dengan karakteristik daerah penelitian. Pendekatan berbasis wilayah diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja dan keberlanjutan UMKM.

Peran strategis UMKM tersebut tercermin dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai 61 persen pada tahun 2024. Kontribusi UMKM tersebut berasal dari berbagai lapangan usaha yang didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan skala kecil, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa lainnya, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan skala mikro dan kecil. Meskipun secara individual skala usaha UMKM relatif terbatas, akumulasi aktivitas ekonomi lintas sektor tersebut menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Sementara itu, sebesar 39 persen PDB Indonesia

berasal dari sektor di luar UMKM atau sektor usaha besar, yang mencakup industri manufaktur skala besar, pertambangan, keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, konstruksi, serta sektor ekonomi korporasi lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi.



Gambar 1.5 Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia 2024
Sumber: (Profil Industri Mikro dan Kecil)

Terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam terkait peran dan kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional. Program Kredit Usaha Rakyat yang terus diperluas dengan realisasi penyaluran yang signifikan pada dasarnya ditujukan untuk memperkuat permodalan UMKM agar mampu meningkatkan produktivitas dan kapasitas usahanya, yang pada akhirnya berpotensi mendorong peningkatan pendapatan pelaku usaha (Raras Santiadin et al., 2023).

Kepemilikan NIB juga menjadi faktor penting dalam pengembangan UMKM karena legalitas tidak hanya mendorong formalitas usaha, tetapi juga membuka akses terhadap berbagai program pemerintah, lembaga keuangan,

serta meningkatkan kepercayaan pasar. Dengan adanya legalitas usaha, UMKM memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang secara berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan usahanya (Riza Purnama et al., 2025). Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMKM turut berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi usaha, sekaligus berperan strategis dalam penyerapan tenaga kerja nasional, mengingat UMKM merupakan sektor dengan jumlah unit usaha terbesar di Indonesia. (Yolanda, 2024).

Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan UMKM melalui akses pembiayaan, kepemilikan legalitas usaha, penyerapan tenaga kerja, serta kemampuan pembiayaan mandiri melalui modal sendiri menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, penggunaan modal sendiri sebagai sumber pembiayaan utama juga berperan dalam memperkuat stabilitas keuangan dan keberlanjutan usaha UMKM, serta meningkatkan kemandirian pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Ni Putu & Lucy, 2023).

Penelitian terdahulu mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kinerja UMKM umumnya menggunakan u dengan menganalisis total penyaluran KUR pada tingkat regional atau nasional. Pendekatan tersebut memiliki keterbatasan karena belum mampu menjelaskan variasi pendapatan antarunit UMKM serta karakteristik pelaku usaha yang mampu memanfaatkan KUR secara optimal. Analisis pada penelitian sebelumnya juga cenderung memisahkan faktor-faktor

yang memengaruhi pendapatan UMKM, baik faktor eksternal seperti akses pembiayaan dan kebijakan pemerintah maupun faktor internal seperti modal sendiri dan jumlah tenaga kerja. Kondisi empiris menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan UMKM dipengaruhi oleh interaksi antara dukungan eksternal berupa akses pembiayaan dan legalitas usaha dengan kapasitas internal pelaku usaha.

Penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian melalui pendekatan mikro berbasis data UMKM pada tingkat individu untuk menganalisis dampak Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan pelaku usaha. Kebaruan penelitian terletak pada pengintegrasian dua faktor eksternal, yaitu Kredit Usaha Rakyat dan legalitas usaha, serta dua faktor internal, yaitu modal sendiri dan jumlah tenaga kerja, ke dalam satu model analisis yang komprehensif. Legalitas usaha diposisikan tidak hanya sebagai indikator formalitas, tetapi sebagai faktor pendukung yang membuka akses UMKM terhadap pembiayaan formal dan program pemerintah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme peningkatan pendapatan UMKM serta menjadi dasar perumusan kebijakan pemberdayaan UMKM yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pendekatan penelitian yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur ekonomi, khususnya dalam kajian pemberdayaan UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan

efektivitas program pembiayaan serta mendukung transformasi UMKM menuju usaha yang lebih produktif dan berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Pendapatan UMKM merupakan indikator penting dalam menilai kinerja sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang berperan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai faktor dapat memengaruhi pendapatan UMKM, antara lain ketersediaan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat, jumlah pekerja yang terserap dalam usaha, legalitas usaha melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha, serta modal sendiri yang dimiliki pelaku usaha. Variabel-variabel tersebut dipilih dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana interaksi antar faktor tersebut dapat mendorong peningkatan pendapatan UMKM dan mengoptimalkan peran UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional. Urgensi untuk mengidentifikasi faktor-faktor ini dan dampaknya terhadap pendapatan UMKM melatarbelakangi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan UMKM?
2. Bagaimana pengaruh jumlah pekerja terhadap pendapatan UMKM?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan Legalitas Usaha terhadap pendapatan UMKM?
4. Bagaimana pengaruh modal sendiri terhadap pendapatan UMKM?

5. Bagaimana pengaruh Kredit Usaha Rakyat, jumlah pekerja, Nomor Induk Berusaha, dan modal sendiri secara simultan terhadap pendapatan UMKM?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kredit Usaha Rakyat, jumlah tenaga kerja, Nomor Induk Berusaha, dan modal sendiri terhadap pendapatan UMKM, yaitu:

1. Menganalisis pengaruh Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan UMKM.
2. Menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap pendapatan UMKM.
3. Menganalisis pengaruh kepemilikan Nomor Induk Berusaha terhadap pendapatan UMKM.
4. Menganalisis pengaruh modal sendiri terhadap pendapatan UMKM.
5. Menganalisis pengaruh Kredit Usaha Rakyat, jumlah pekerja, Nomor Induk Berusaha, dan modal sendiri secara simultan terhadap pendapatan UMKM?

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang berkepentingan dalam penjabaran sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, penelitian ini menjadi sarana penerapan konsep dan teori ekonomi ke dalam kajian empiris terkait UMKM, sekaligus sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta.

2. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan UMKM yang lebih efektif dan tepat sasaran. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat desain kebijakan penyaluran Kredit Usaha.
3. Rakyat, mendorong peningkatan formalitas usaha melalui kepemilikan legalitas usaha, serta mengintegrasikan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia UMKM. Kebijakan yang dirumuskan tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah UMKM dan penyaluran pembiayaan, tetapi juga pada peningkatan produktivitas, pendapatan, dan keberlanjutan usaha UMKM.
4. Bagi pelaku UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan pendapatan usaha, khususnya terkait pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengelolaan modal sendiri, penentuan jumlah tenaga kerja yang optimal, serta pentingnya formalisasi usaha melalui kepemilikan legalitas usaha.
5. Bagi Lembaga Keuangan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam menilai efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya dalam kaitannya dengan karakteristik internal UMKM seperti kepemilikan legalitas usaha, kapasitas tenaga kerja, dan struktur permodalan. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi penyaluran kredit yang lebih tepat sasaran, meningkatkan kualitas penilaian kelayakan kredit, serta meminimalkan

risiko pembiayaan melalui penguatan aspek formalisasi dan keberlanjutan usaha debitur UMKM.

1.5. Sistematika Bab

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan konteks penelitian tentang peran UMKM dalam perekonomian Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), jumlah pekerja, Legalitas Usaha (LU), dan modal sendiri. Bab ini juga menyajikan rumusan masalah penelitian yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian bagi berbagai pihak, serta sistematika penulisan yang menggambarkan struktur keseluruhan penelitian secara sistematis dan terstruktur.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang relevan dengan penelitian, meliputi teori-teori ekonomi yang mendasari hubungan antara variabel independen (kredit usaha rakyat, jumlah pekerja, legalitas usaha, dan modal sendiri) dengan variabel dependen (pendapatan UMKM). Bab ini juga menyajikan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain baik dari jurnal internasional maupun nasional yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, kerangka pemikiran yang menggambarkan alur berpikir peneliti dalam menganalisis hubungan antar

variabel, serta hipotesis penelitian yang merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengumpulan data dan pengolahan data. Terdiri dari penjelasan mengenai objek penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, teknik dan analisis data yang digunakan.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan uraian hasil analisis data sesuai dengan alat dan teknik analisis data yang meliputi analisis deskriptif, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis baik secara parsial maupun simultan, serta pembahasan hasil penelitian yang menginterpretasikan temuan penelitian dengan mengaitkannya dengan teori dan hasil penelitian terdahulu untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan penjelasan mendalam tentang fenomena yang diteliti.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan sintesis dari keseluruhan temuan penelitian dan menjawab rumusan masalah serta tujuan penelitian, dan saran-saran yang berisikan pendapat atau anjuran yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya.